

**ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS
DI SELURUH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI TAHUN 2017-2021**Samita Jayanti ¹I Made Endra Kartika Yudha²^{1, 2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia**ABSTRAK**

Kriminalitas merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Pada tahun 2017 hingga 2021 angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Bali menunjukkan tren menurun, namun angka tersebut terbilang masih tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi secara simultan dan parsial terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil melalui Kepolisian Daerah Bali dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel yang menghasilkan model terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) secara simultan variabel pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan dummy pandemi berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; 2) secara parsial variabel pendidikan, pendapatan perkapita, dan dummy pandemi berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan variabel pengangguran, kemiskinan, dan jumlah polisi tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci: kriminalitas, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi.

ABSTRACT

Crime is a social problem that can disturb security and comfort in society. From 2017 to 2021 the crime rate that occurred in Bali Province shows a downward trend, but this figure is still relatively high. The purpose of this study is to analyze the simultaneous and partial effects of education, unemployment, poverty, per capita income, number of police, and pandemic on crime rates in districts/cities of Bali Province. This study uses secondary data collected from the Bali Regional Police and the Bali Province Central Statistics Agency (BPS). The analysis technique in this study is using panel data regression which produces the best model, namely the Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that 1) simultaneously the variables of education, unemployment, poverty, per capita income, the number of police, and the dummy pandemic affect the crime rate in the districts/cities of the Province of Bali; 2) partially the variables of education, per capita income, and the pandemic dummy have an effect on the crime rate in the districts/cities of Bali province, while the variables of unemployment, poverty, and the number of police officers have no effect on the crime rate in the districts/cities of the province of Bali.

Keywords: Crime, Education, Unemployment, Poverty, Per Capita Income, Number of Police, and Pandemic.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju dengan pesat sehingga menimbulkan semakin pesatnya persaingan yang ada. Globalisasi berdampak pada semakin mudahnya seseorang masuk dan keluar ke dalam suatu daerah berimplikasi pada masuk keluarnya budaya-budaya asing ke dalam negeri. Nilai-nilai baru yang masuk membawa beberapa perubahan terhadap perilaku masyarakat. Tak terkecuali nilai-nilai negatif yang datang menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Keinginan pemenuhan kebutuhan yang melimpah seseorang jika tidak diiringi dengan kemampuan atau skill yang baik maka akan sulit untuk mencapai kebutuhan materi yang diinginkan sehingga memaksa seseorang untuk mendapatkannya dengan cara instan dan melakukan tindakan kejahatan (Rahmalia, Ariusni, & Triani, 2019). Kriminalitas adalah semua perbuatan yang melanggar hukum pidana. Karakteristik kriminalitas adalah perbuatan yang membahayakan fisik dan harta orang lain. Kriminalitas yang membahayakan fisik berupa pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan perbudakan, serta narkoba dan obat-obatan terlarang. Sedangkan kriminalitas yang mengancam harta orang lain berupa perampasan hak milik, penipuan, penggelapan, dan korupsi (Riyardi & Guritno, 2022).

Kriminalitas dilakukan secara sadar. Pelaku kriminalitas mengambil keputusan melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan antara manfaat dan biaya kriminalitas (Riyardi & Guritno, 2022). Pendekatan ekonomi dalam mengkaji kriminalitas didorong keputusan pelaku mendapatkan biaya dan manfaat atas tindak kejahatan sebagai insentifnya. Sebagai respon, negara berupaya menekan kejahatan dengan menambah petugas polisi, jaksa, dan sel penjara untuk memastikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan (Adri, Karimi, & Indrawari, 2019). Tingkat kriminalitas rendah merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Rendahnya tingkat kriminalitas menunjukkan kesejahteraan, sebab memberikan rasa aman bagi semua pihak (Riyardi & Guritno, 2022).

Jumlah tindak pidana pencurian yang dilaporkan dari tahun 2017 hingga 2021, berdasarkan catatan Polda Bali, menunjukkan tren menurun atau berkurang. Jumlah kasus tertinggi tercatat pada tahun 2017 sebanyak 801 kasus, lalu mengalami penurunan hingga titik terendah yaitu 416 kasus pada tahun 2021. Kasus pencurian yang masih tergolong tinggi sangat memerlukan perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Apabila dilihat dari jumlah pencurian tersebut tentu akan lebih besar jika ditambah dengan kasus yang tidak dilaporkan atau tidak terpantau.

Munculnya pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku kejahatan didasari asumsi bahwa individu melakukan kejahatan secara rasional. Seseorang ketika melakukan tindak kejahatan akan memikirkan benefit yang didapatkan dan risiko maupun hukuman yang diterima. Gary S. Becker adalah peneliti pertama yang memasukkan faktor ekonomi ke dalam model kejahatan. Dia melihat untuk menekan angka kriminal tidak cukup dengan pendekatan punishment, sebab tindak kriminal berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dimana pelaku kriminal memperhitungkan benefit dan cost. Dengan demikian sangat relevan jika model ekonomi dimasukkan ke dalam analisis perilaku tindak kriminal. Jenis kejahatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kejahatan properti, seperti penipuan, pencurian dan perampokan (Masfiatun, 2019).

Banyak upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum untuk mengurangi angka kriminalitas, mulai dari pencegahan hingga pemberian hukuman bagi para pelaku kejahatan. Seperti yang sering ditemui melalui televisi, koran, maupun internet yang menyebutkan bahwa pelaku tindak kriminal mengakui aksinya tersebut karena permasalahan ekonomi mulai dari pengangguran, kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi, hingga kemiskinan (Wicaksono, 2022).

Salah satu cara yang digunakan untuk menekan angka kriminalitas yaitu dengan hukuman atau dengan cara meningkatkan upah pendapatan. Cara untuk meningkatkan upah pendapatan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan (Dewi, 2021). Hubungan antara pendidikan dan kejahatan adalah premi

kelulusan atau tingkat pengembalian pendidikan. Kelulusan meningkatkan upah, dan upah yang lebih baik mereduksi kriminalitas (Adri dkk., 2019).

Tingkat pendidikan terendah di Provinsi Bali menurut badan pusat statistik terdapat pada tahun 2017 yaitu 8,55 persen, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi di Provinsi Bali terdapat pada tahun 2021 yaitu 9,06 persen. Semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan seseorang berpendidikan tinggi, dan waktu luang yang dimiliki akan lebih banyak dibandingkan dengan seseorang berpendidikan tinggi. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas (Rahmalia, Ariusni, & Triani, 2019).

Pengangguran dapat menjadi dampak buruk bagi perekonomian individu maupun masyarakat (Putra dkk., 2020). Besarnya tingkat pengangguran, tidak terlepas dari faktor rendahnya kesempatan kerja yang diperoleh masyarakat. Rendahnya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja ini dapat disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak mampu bekerja dan tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Putra & Arka, 2018). Seorang pengangguran tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu, ketika seorang individu lebih lama menjadi pengangguran maka peluang untuk melakukan tindakan kriminal akan semakin tinggi (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Tingkat pengangguran di Provinsi Bali dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terendah di Provinsi Bali periode 2017 hingga 2021 terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 35.811 ribu orang, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Provinsi Bali naik drastis yaitu sebesar 144.500 ribu orang kemudian kembali menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar 138.669 ribu orang.

Tingginya angka pengangguran suatu wilayah akan menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Semakin tinggi angka pengangguran maka semakin buruk pembangunan ekonominya. Pengangguran yang tidak memiliki

pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap harus memenuhi kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup. Namun, ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap tidak sepadan dengan tenaga yang ada sehingga ada individu tertentu memilih melakukan hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga terjadilah tindakan kriminalitas (Sari, 2019). Apabila pengangguran tidak teratasi dapat menyebabkan masalah baru yaitu antara lain kemiskinan (Wicaksono, 2022).

Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan orang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kemamkmuran ekonomi menurunkan aktivitas kriminal (Rahmalia, Ariusni, & Triani, 2019). Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (Putra dkk., 2020). Faktanya individu yang berada di bawah tekanan hidup yang serba kekurangan atau dalam hal ini adalah orang miskin, mendorong untuk melakukan tindakan pencurian, sehingga tingkat kemiskinan yang meningkat atau tumbuh positif mendorong seseorang berbuat tindakan kriminal (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi (Purwanti & Widyaningsih, 2019).

Menurut ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai gambaran tentang kondisi perekonomian di suatu wilayah. Nilai PDRB apabila dibagi dengan jumlah penduduk maka dapat menjadi gambaran tingkat pengeluaran tiap penduduk. Maka tidak jarang PDRB perkapita dijadikan tolak ukur kesejahteraan dan indikator pembangunan. Dalam penelitian ini PDRB perkapita dapat dikaitkan dengan masalah kriminalitas. Semakin tinggi pengeluaran penduduk maka tingkat kesejahteraan penduduk makin tinggi sehingga angka kriminalitas akan menurun (Wicaksono, 2022). Penurunan kesejahteraan menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan, artinya apabila PDRB perkapita menurun maka

konflik akan terjadi dan meningkatkan kasus kriminalitas, seperti pencurian, perampokan rumah, perampasan, dan penjambretan (Purwanti & Widyaningsih, 2019).

Tindak kriminal yang tinggi akan menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepercayaan masyarakat akan keamanan kota akan semakin berkurang dan berakibat pada perkembangan kota, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang akan menurun, serta bertambahnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak kepolisian merupakan pemangku kepentingan dalam mengatasi tindak kriminal (Putri, Haryatiningsih, & Haviz, 2019). Polisi adalah salah satu bagian dari program pemerintah dalam menangani kejahatan. Perekrutan kepolisian tergantung kepada kebijakan dari pusat atau daerah setempat. Sebagai tambahan indikator peningkatan jumlah polisi menggunakan seberapa besar tingkat kriminalitas di daerah tersebut. Semakin tinggi kriminalitas semakin tinggi pula perekrutan akan kebutuhan polisi (Nadilla & Farlian, 2018).

Dari uraian di atas terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kriminalitas antara lain, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah. 1) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi secara simultan terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021. 2) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi secara parsial terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi terhadap tingkat kriminalitas di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang

digunakan mencakup data regional yaitu data Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali secara tahunan yang diambil dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Variabel bebas adalah Pendidikan (X1), Pengangguran (X2), Kemiskinan (X3), Pendapatan Perkapita (X4), Jumlah Polisi (X5), dan Dummy Pandemi (X6) serta variabel terikat adalah Tingkat Kriminalitas (Y).

Pendidikan (X1), merupakan data rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diukur dalam satuan tahun. Pengangguran (X2), merupakan data jumlah pengangguran di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diukur dalam satuan ribu orang. Kemiskinan (X3), merupakan data jumlah penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diukur dalam satuan ribu orang. Pendapatan Perkapita (X4), merupakan data PDRB Perkapita di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diukur dalam ribu rupiah. Jumlah Polisi (X5), merupakan data jumlah personel polisi di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2017-2021 yang diukur dalam jumlah jiwa. Dummy Pandemi (X6), adalah untuk membedakan kondisi sebelum dan sesudah pandemi di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali. Diukur dengan 0 dan 1, dimana sebelum pandemi (0) dari tahun 2017-2019 dan sesudah pandemi (1) dari tahun 2020-2021. Kriminalitas (Y), merupakan data jumlah tindak pencurian yang dilaporkan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diukur dalam satuan kasus.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Biro SDM Kepolisian Daerah Provinsi Bali, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dari tahun 2017 hingga tahun 2021 serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang merupakan hasil dari pengamatan pada beberapa individu (*unit cross-sectional*)

yang merupakan masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (*time series*). Analisis data panel dengan taraf nyata 5 persen, persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + D_6 X_{6it} + e_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Kriminalitas
- X1 : Pendidikan
- X2 : Pengangguran
- X3 : Kemiskinan
- X4 : Pendapatan Perkapita
- X5 : Jumlah Polisi
- X6 : Dummy Pandemi
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, D_6$: Koefisien regresi variabel
- e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data menggunakan teknik estimasi data panel dengan metode *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Kemudian dari ketiga model tersebut ditentukan model terbaik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen menggunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*.

Penggunaan uji chow bertujuan untuk menentukan model yang tepat antara model *common effect* atau model *fixed effect* dengan melihat nilai probabilitas (*p-value*). Apabila probabilitas kurang dari $< \alpha$ (0,05) berarti menolak H0 sehingga *model fixed effect* adalah model yang tepat. Sebaliknya apabila probabilitas lebih dari $> \alpha$ (0,05) berarti gagal menolak H0 sehingga model *common effect* adalah model yang tepat.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	7,424366	0,0000
Cross-section Chi-square	49,133997	0,0000

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Berdasarkan hasil uji chow di atas maka diperoleh nilai *prob. cross section* F Sebesar 0,0000 ($\text{prob} < 0,05$) sehingga H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang tepat adalah *fixed effect*.

Penggunaan uji hausman bertujuan untuk menentukan model yang tepat antara model random effect atau model fixed effect dengan melihat nilai probabilitas (p-value). Apabila probabilitas kurang dari $< \alpha$ (0,05) berarti menolak H_0 sehingga model fixed effect adalah model yang tepat. Sebaliknya apabila probabilitas lebih dari $> \alpha$ (0,05) berarti gagal menolak H_0 sehingga model *random effect* adalah model yang tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross-section random	15,262493	0,0183

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Berdasarkan hasil uji hausman di atas maka diperoleh nilai *prob.* sebesar 0,0183 ($\text{prob} < 0,05$) sehingga H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang tepat adalah *fixed effect*. Setelah melakukan estimasi untuk menentukan model yang tepat dengan uji chow dan uji hausman maka dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* merupakan model terbaik untuk menentukan model regresi.

Berikut hasil uji regresi dengan model regresi *fixed effect*.

Tabel 3. Model Fixed Effect

Variabel Independen	Coeff.	Prob.
C	4,728309	0,3171
Pendidikan	-4,253094	0,0257
Pengangguran	0,018706	0,8744
Kemiskinan	-0,276224	0,5048
PDRB Perkapita	-0,118134	0,0105
Jumlah Polisi	0,604988	0,6743
Pandemi	-0,177675	0,0259
R-squared	0,943293	
Adjusted R- squared	0,916830	
Prob (F-statistic)	0,000000	

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Sehingga persamaan model regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{CRIME} = 4,728309 - 4,253094 X_1 + 0,018706 X_2 - 0,276224 X_3 - 0,118134 X_4 + 0,604988 X_5 - 0,177675 X_6$$

Nilai prob (F-statistic) sebesar $0,00 < (0,05)$ yang berarti variabel pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kriminalitas.

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,91 (91%) mengandung arti bahwa kriminalitas dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan, pengangguran, kemiskinan, pendapatan perkapita, jumlah polisi, dan pandemi sebesar 91%, sedangkan sisanya ($100\% - 91\% = 9\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji secara parsial yaitu yang pertama pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Nilai koefisien sebesar $-4,253094$ berarti jika rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 1% maka tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali menurun sebesar 4,25% kasus. Nilai probabilitas sebesar $0,0257 < (0,05)$ berarti kenaikan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Edwart & Azhar, 2019) menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan (Nadilla & Farlian, 2018) yang berjudul menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Penelitian dari (Hulu, 2022) menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Winda & Sentosa, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan

terhadap tindakan kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Dewantoro, 2022) menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di karesidenan Surakarta. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Rahmalia, Ariusni, & Triani, 2019) yang menyatakan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Khairani & Ariesa, 2019) juga menyatakan bahwa variabel Pendidikan secara parsial tidak adanya pengaruh terhadap kriminalitas di Sumatra Utara. Penelitian dari (Putra, Martha, Fikram, & Yuhan, 2020) menyatakan bahwa variabel pendidikan dan pengangguran secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.

Hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa pendidikan tinggi sangat berpengaruh untuk membuat angka kriminalitas menurun. Dalam teori "Human Capital" diasumsikan bahwa seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Simanjuntak (1998) bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Seseorang dengan Pendidikan tinggi mampu mengambil peluang-peluang tertentu sehingga celah seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan tertutup. Menurut Todaro (2000), menyebutkan bahwa peningkatan pendidikan bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan "modal manusia" di masa yang akan datang. Peningkatan pendidikan secara umum dapat pula memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang (Fikri, 2017).

Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran memiliki nilai koefisien sebesar 0,018706 dan nilai probabilitas $0,8744 > (0,05)$ yang berarti bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

(Sari, 2019) yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kriminalitas di kecamatan Jabung, Lampung Timur. Selain itu diperkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan Mutmainnah Hijriah SR (2020), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Kota Makassar. Artinya, tingkat pengangguran yang tinggi tidak akan mempengaruhi tindak kriminalitas di Kota Makassar. Penelitian dari (Khairani & Ariesa, 2019) juga menyatakan bahwa variabel pengangguran secara parsial tidak adanya pengaruh terhadap kriminalitas di Sumatra Utara. Penelitian dari (Putra, Martha, Fikram, & Yuhan, 2020) menyatakan bahwa pengangguran secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia pada 2018. Penelitian dari (Rahmi & Adry, 2018) menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Anggrayni, 2022) menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kejahatan harta benda.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Rahmalia, Ariusni, & Triani, 2019) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Kosmaryati, Handayani, Isfahani, & Widodo, 2019) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah kriminalitas. penelitian dari (Hulu, 2022) menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kriminalitas. Penelitian dari (Winda & Sentosa, 2022) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tindakan kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Nadilla & Farlian, 2018) menyatakan bahwa pengangguran memiliki koefisien positif signifikan terhadap kriminalitas di provinsi Aceh. Penelitian dari (Purwanti & Widyaningsih, 2019) menyatakan bahwa pengaruh pengangguran terhadap angka kriminalitas di Jawa Timur adalah positif dan signifikan.

Mankiw (2016) menjelaskan alasan adanya pengangguran adalah dibutuhkan waktu untuk mencocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan. Atas dasar alasan ini, mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu serta usaha disebabkan pekerjaan

yang berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda serta upah yang juga berbeda. Artinya, penelitian yang dilakukan di kabupaten/kota provinsi Bali sejalan dengan penelitian terhadulu yang menyatakan bahwa variabel pengangguran saja tidak mampu untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas. Kriminalitas diakibatkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti atau sehingga mampu mempengaruhi kriminalitas di kabupaten/kota provinsi Bali.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel kemiskinan memiliki nilai koefisien sebesar -0,276224 dan nilai probabilitas $0,5048 > (0,05)$ yang berarti bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2019) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas. Penelitian dari (Winda & Sentosa, 2022) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap tindakan kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Rahmi & Adry, 2018) menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Hulu, 2022) menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Penelitian dari (Septaria & Zulfaridatulyaq, 2021) menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Purwanti & Widyaningsih, 2019) menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap angka kriminalitas di Jawa Timur adalah positif dan signifikan. Penelitian dari (Anggrayni, 2022) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap kejahatan harta benda. Penelitian dari (Dewantoro, 2022) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap kriminalitas di Karesidenan Surakarta. Penelitian dari (Desinta, 2022) menyatakan bahwa persentase penduduk miskin signifikan memengaruhi jumlah tindak kejahatan di

provinsi Jawa Barat. Penelitian dari (Putra, Martha, Fikram, & Yuhan, 2020) menyatakan bahwa kemiskinan secara parsial signifikan memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian dari (Rahmalia, Ariusni, & Triani, 2019) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Sosiolog asal Jerman, Ralf Dahrendorf (1959). Dahrendorf menyatakan bahwa masalah kemiskinan dapat menyebabkan manusia melakukan tindak kriminalitas. Akibat tidak terpenuhi suatu kebutuhan, manusia dapat melakukan tindak kriminalitas dalam berbagai bentuk, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antar individu yang satu dengan yang lain. Namun dapat didukung dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh James Q. Wilson dan Richard Herrnstein (1985) yang menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi kemungkinan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Individu yang memiliki kontrol diri yang kuat dan terhubung dengan institusi sosial yang stabil, seperti keluarga yang berfungsi dengan baik dan komunitas yang mendukung, mungkin memiliki peluang yang lebih rendah untuk terlibat dalam kejahatan, meskipun mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Ini artinya kemiskinan tidak mempengaruhi seseorang atau individu untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas, karena tingkat penyelesaian kasus dan keamanan yang tinggi mampu meminimalisir angka kejadian kriminalitas di suatu daerah sehingga miskin bukan menjadi penyebab masalah ini terjadi.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kriminalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pendapatan perkapita yang diukur berdasarkan PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Nilai koefisien sebesar $-0,118134$ berarti jika PDRB perkapita meningkat sebesar 1% maka tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali menurun sebesar 0,11% kasus. Nilai probabilitas sebesar $0,0105 < (0,05)$ berarti kenaikan PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB perkapita berpengaruh terhadap tingkat

kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Purwanti & Widyaningsih, 2019) yang menunjukkan bahwa pengaruh PDRB perkapita terhadap angka kriminalitas di Jawa Timur adalah negatif dan terbukti signifikan. Penelitian Saqib Amin & Nawaz Ahmad (2018) juga menunjukkan bahwa pendapatan perkapita memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti dan kekerasan. Penelitian (Nadilla & Farlian, 2018) menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kriminalitas. Penelitian dari (Khairani & Ariesa, 2019) menyatakan bahwa PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap terjadinya kriminalitas di Sumatera Utara. Penelitian dari (Desinta, 2022) menyatakan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kejahatan di provinsi Jawa Barat. Penelitian dari (Dewantoro, 2022) menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh terhadap kriminalitas di Karesidenan Surakarta. Penelitian dari (Hulu, 2022) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kriminalitas di Indonesia.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Anggrayni, 2022) Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kejahatan harta benda. Penelitian dari (Nadilla & Farlian, 2018) menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kriminalitas di provinsi Aceh. Penelitian dari (Putri, Haryatiningsih, & Haviz, 2019) menyatakan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap tindak kriminal terlapor. Teori strain ekonomi yang dikemukakan oleh Cloward dan Ohlin (1960) dalam karyanya yang berjudul "Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs" menyatakan bahwa ketika ada perbedaan yang signifikan antara tujuan ekonomi yang diinginkan dan peluang ekonomi yang tersedia, individu cenderung terlibat dalam kejahatan sebagai cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Peningkatan pendapatan perkapita memberi peluang bagi individu untuk mendapatkan pendapatan yang semakin tinggi, hal ini akan menekan tindak kejahatan. Hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa PDRB perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat

pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan perkapitanya semakin makmur negara tersebut.

Pengaruh Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kriminalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah polisi memiliki nilai koefisien sebesar 0,604988 dan nilai probabilitas $0,6743 > (0,05)$ yang berarti bahwa variabel jumlah polisi tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa jumlah polisi berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yeong, 2019) menyatakan peningkatan jumlah polisi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penangkapan kejahatan properti. Penelitian (Lee, Corsaro, & Eck, 2016) juga menyatakan hasil ukuran pasukan polisi terhadap kejahatan adalah tidak signifikan secara statistik. Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian (Nadilla & Farlian, 2018) yang menyatakan bahwa jumlah polisi berpengaruh positif terhadap kriminalitas di provinsi Aceh. Penelitian dari (Putri, Haryatiningsih, & Haviz, 2019) menyatakan bahwa jumlah polisi memiliki pengaruh positif terhadap tindak kriminal terlapor di Jawa Barat. Kriminalitas tidak hanya terjadi di satu tempat melainkan bergerak ke daerah-daerah lain dan membuat polisi menjadi sulit untuk menangkap pelaku kriminalitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Efisiensi Polisi yang dikemukakan oleh (Kelling & Moore, 1988), menyatakan bahwa efektivitas kepolisian lebih didasarkan pada bagaimana polisi memanfaatkan sumber daya dan interaksi mereka dengan masyarakat daripada pada jumlah polisi itu sendiri. Peningkatan jumlah polisi tanpa strategi yang tepat atau interaksi yang baik dengan masyarakat mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan pada penurunan kejahatan. Kemudian Teori Efek Pemilihan yang dikemukakan oleh (Klick & Tabarrok, 2005) menyatakan bahwa ketika kepolisian mengalokasikan sumber daya mereka untuk mengurangi kejahatan di suatu area tertentu, pelaku kejahatan cenderung beralih ke area lain yang kurang diawasi. Dalam

hal ini, peningkatan jumlah polisi di suatu wilayah dapat menghasilkan efek pemilihan dan tidak secara langsung mengurangi kejahatan secara keseluruhan.

Pengaruh Dummy Pandemi Terhadap Tingkat Kriminalitas. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel dummy pandemi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Nilai koefisien sebesar $-0,177675$ yang berarti peluang seseorang melakukan kejahatan lebih rendah saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Pandemi telah menyebabkan peluang kejahatan lebih kecil yaitu menurun sebesar $0,17\%$ dibandingkan sebelum pandemi. Nilai probabilitas sebesar $0,0259 < (0,05)$ berarti adanya pandemi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa pandemi berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Miaomiao Hou, Zhaolong Zeng, Xiaofeng Hu, Jinming Hu (2022), menyatakan sebagian besar jenis kejahatan mengalami penurunan jumlah insiden selama pandemi dibandingkan sebelumnya. Penelitian Zakir Amer Sami (2022), menyatakan tingkat kejahatan secara keseluruhan telah menurun di seluruh dunia selama pembatasan COVID-19. Penelitian Mikaela Meyer, (2022), juga menyatakan tingkat pencurian dan perampokan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pandemi yang mengimplikasikan bahwa pembatasan karantina wilayah mengurangi tingkat kejahatan. Ben Stickle & Marcus Felson, 2020, juga menunjukkan tingkat kejahatan, yang tampaknya turun drastis di banyak komunitas di seluruh dunia. Alasan utama perubahan tersebut adalah perintah pemerintah untuk tinggal di rumah, yang berdampak pada aktivitas rutin seluruh populasi. Pandemi dapat mempengaruhi kesempatan kejahatan. Faktor-faktor seperti pembatasan sosial dan perubahan rutinitas seiring dengan pandemi dapat mengurangi kesempatan kejahatan. Dalam beberapa kasus, kegiatan sosial dan ekonomi yang umumnya terkait dengan kejahatan dapat berkurang selama periode lockdown, misalnya karena penutupan bisnis atau peningkatan patroli polisi, hal ini dapat mengurangi peluang untuk kejahatan tertentu, seperti perampokan atau pencurian.

SIMPULAN

- 1) Variabel Pendidikan, pengangguran, kemiskinan, PDRB perkapita, jumlah polisi, dan pandemi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021.
- 2) Variabel Pendidikan, PDRB perkapita, dan pandemi secara individu (parsial) berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. sedangkan variabel pengangguran, kemiskinan, dan jumlah polisi, secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021.

SARAN

- 1) Sebaiknya pemerintah meningkatkan fasilitas Pendidikan agar dapat menghasilkan SDM terdidik dan berkualitas. Seseorang dengan pendidikan tinggi diharapkan mampu mengambil peluang-peluang tertentu sehingga celah seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan tertutup.
- 2) PDRB perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan dapat memberi peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mendukung kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat berupa bantuan keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan teknis untuk memulai atau mengembangkan usaha, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan diharapkan dapat memperkecil peluang seseorang melakukan tindak kejahatan.
- 3) Pandemi berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan menurunkan peluang kejahatan, karena peluang ini turun akibat ada pembatasan aktivitas selama pandemi. Apabila terjadi peningkatan kejahatan ekstrim model pembatasan tersebut dapat digunakan.

REFERENSI

- Adri dkk. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5 (2), hal. 181-186.
- Adri, S., Karimi, S., & Indrawari. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(2), hal. 181-186.
- Anggrayni, A. S. (2022). The Effect of Economic Factors on Property Crime Rates. *Indonesian Journal of Development Economics*, 5 (2), hal. 123-131.
- BPS Bali. (2021). Jumlah Tindak Pidana Yang Dilaporkan (Crime Total) Provinsi Bali Tahun 2012-2021. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- BPS Bali. (2021). Pengangguran di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun (Persen) 2012-2021. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:
- BPS Bali. (2021). Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2012-2021. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provnsi Bali:
- Desinta, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kejahatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Populer*, 5 (1), hal. 20-29.
- Dewantoro, D. M. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pdrb Perkapita, Pengangguran, Dan Upah Minimum, Terhadap Tingkat Kriminalitas di Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2020. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1-12.
- Dewi, K. K. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2019. *Repository Raden Intan*, Hal. 1-118.
- Edwart , A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* , 1 (3), hal. 759 - 768.
- Fikri , F. (2017). Pengaruh Human Capital (Modal Manusia) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Hal. 1-9.

- Hou, M., Zeng, Z., Hu, X., & Jinming. (2022). Investigating the impact of the COVID-19 pandemic on crime incidents number in different cities. *Journal of Safety Science and Resilience*, 3, 340–352.
- Hulu, D. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Kriminalitas Di Indonesia Dengan Regresi Data Panel Pada Tahun 2016-2020. *UIN SUSKA Riau*, hal. 1-66.
- Kelling, G., & Moore, M. (1988). The Evolving Strategy of Policing. *National Institute of Justice*, 4, 1-16.
- Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara (Pendekata Ekonomi). *JURNAL JEPA: Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4 (2), hal. 99-110.
- Klick , J., & Tabarrok, A. (2005). Using Terror Alert Levels to Estimate the Effect of Police on Crime. *The Journal of Law and Economics*, 48 (1).
- Kosmaryati, Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2011-2016 Dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2 (1), hal. 10-20.
- Lee, Y., Corsaro, N., & Eck, J. (2016). Conclusions from the history of research into the effects of police force size on crime 1968 through 2013: a historical systematic review. *J Exp Criminol*, 12, hal. 431–451.
- Masfiatun. (2019). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), hal. 89-110.
- Meyer, M., Hassafy, A., Lewis, G., & Nagin, P. (2022). Changes in Crime Rates during the COVID-19 Pandemic. *Statistics and Public Policy*, 9(1), hal. 97-109,.
- Nadilla, U., & Farlian, T. (2018). Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan, Pengangguran, Dan Jumlah Polisi Terhadap Angka Kriminalitas Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3 (1), hal. 110-118.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9 (2), hal. 154-177.
- Putra dkk. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018.

- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal Of Applied Statistics*(3 (2)), hal. 123-131.
- Putra, I. A., & Arka, S. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 (3), 416-444.
- Putri, C. U., Haryatiningsih, R., & Haviz, M. (2019). Pengaruh PDRB Perkapita dan Jumlah Polisi Terhadap Tindak Kriminal Terlapor di 7 Kota Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2014-2016. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5 (1), hal. 91-96.
- Rahmalia, Ariusni, & Triani. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1 (1), hal. 21-36.
- Rahmi, M., & Adry, M. R. (2018). Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Ecosains*, 7 (2), Hal. 147-154.
- Riyardi , A., & Guritno, R. B. (2022). Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas Di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), hal. 50-61.
- Sami, Z. A. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Crime. *USURJ: University of Saskatchewan Undergraduate Research Journal.*, 8(2), hal. 1-9.
- Sari, N. J. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kecamatan Jabung, Lampung Timur Ditinjau Dari Nilai-Nilai Ajaran Islam. *Raden Intan Lampung*, hal. 1-108.
- Septaria , R., & Zulfaridatulyaq, S. M. (2021). Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan Pendekatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4 (1), hal 50-64 .
- Stickle , B., & Felson, M. (2020). Crime Rates in a Pandemic: the Largest Criminological Experiment in History. *American Journal of Criminal Justice*, 45, hal. 525-536.
- Wicaksono, A. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Pendekatan Ekonomi.

Analisis Faktor Sosial.....[Samita Jayanti, I Made Endra Kartika Yudha]

Universitas Islam Indonesia, hal. 1-69.

Wilson, J., & Herrnstein, R. (1985). *Crime and Human Nature*. Amerika Serikat: Simon & Schuster.

Winda, N., & Sentosa, S. U. (2022). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kriminalitas Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3 (4), hal 65-72.

Yeong, S. (2019). *The effect of police on crime and arrests: Are police deterring or incapacitating criminals?* Bureau of Crime Statistics and Research. Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research.